

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir dikategorikan sebagai bencana alam yang berasal dari kondisi kelebihan air yang muncul di permukaan. Selain kondisi tersebut, peristiwa banjir berdampak bagi keberlangsungan hidup manusia secara materil. Aspek ekonomi sebagai dampak bencana banjir menempati posisi utama yang dirasakan oleh manusia. Jika jumlah eskalasi enangan dan arus banjir sangat tinggi, dapat menghilangkan nyawa seseorang. Namun kesemua dampak tersebut tetap ditentukan berdasarkan tingkat genangan banjir itu sendiri. Banjir sebagai bencana alam cenderung berakibat ke arah kerusakan. Lain halnya dengan peristiwa letusan gunung berapi yang memiliki pengaruh pada tingginya tingkat kesuburan tanah.

Penyebab banjir pada umumnya berasal dari hasil akumulasi faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam berkaitan dengan kondisi geografis beserta iklim yang meliputi wilayah tersebut. Tingginya intensitas curah hujan yang berdampak pada meluapnya air di sungai merupakan salah satu contoh penyebab banjir berasal dari kondisi alam. Sementara kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia termasuk dalam faktor non-alam. Hubungan manusia dengan lingkungannya menyumbang andil terbesar terjadinya kerusakan lingkungan. Perusakan lingkungan ini berkaitan pada tiga elemen, yaitu elemen pengairan, kehutanan, dan lahan.

Kehadiran bencana alam terbilang sukar untuk diprediksi secara gamblang, meskipun tindakan pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan sedari awal. Bencana banjir yang kerap terjadi di suatu wilayah tidak menutup kemungkinan datang tanpa memberikan peringatan sebelumnya. Bencana banjir di Kediri misalnya, sejak memasuki abad ke 20 menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda.¹ Wilayah Kediri dikatakan termasuk ke dalam wilayah rawan banjir pada masa itu atas dasar sebagai daerah yang dilalui sungai Brantas dan berada di wilayah kaki gunung berapi Gunung Kelud. Hubungan sungai Brantas dengan gunung berapi ini terletak pada dampak dari letusan berupa lahar dingin yang melewati sungai Brantas. Hingga berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial, persoalan pengendalian dan pencegahan banjir dirasa kurang optimal. Pasalnya, bencana banjir tetap menggenangi daerah Kediri di akhir masa kekuasaan pemerintah kolonial.

Bencana banjir di Kediri di era pemerintah kolonial diidentifikasi memiliki tiga faktor penyebab. Penyebab tersebut antara lain adalah luapan sungai Brantas, tingginya intensitas curah hujan, dan yang terakhir adalah dampak dari letusan gunung Kelud yang membawa material ke dalam Sungai Brantas. Namun, pada masa pemerintah Jepang bencana banjir di Kediri memiliki penyebab yang berbeda selain dari tingginya intensitas curah hujan dan letusan gunung Kelud. Pembukaan lahan ribuan hektar oleh penduduk setempat di pegunungan di wilayah Trenggalek, Tulungagung, dan Pacitan menjadi awal mula penyebab banjir terparah tahun 1942

¹Dahlia Koni Saputri, "Bencana Banjir di Kediri Tahun 1900-1942". Skripsi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.

di era pendudukan Jepang. Namun, pembukaan hutan serta pendudukan hutan yang diteruskan mendukung terjadinya peristiwa banjir di Kediri hingga pasca kemerdekaan.

Tercatat bencana banjir terparah di Kediri pada masa pemerintah Jepang terjadi di bulan November 1942. Meskipun di bulan Februari di tahun yang sama juga terjadi banjir. Banjir bulan November melumpuhkan aktivitas warga karena dampak yang ditimbulkan. Pada tanggal 16 November 1942 diberitakan puluhan *bau*² sawah dan rumah-rumah terendam serta akses jalan yang digenangi air mengakibatkan perahu menjadi alat transportasi utama menggantikan dokar³. Bahkan redaksi dari *Pewarta Perniagaan* menyebut banjir yang terjadi di Kediri pada bulan November 1942 adalah air bah. Dikatakan pula genangan banjir sampai ke alun-alun mengubah jalan raya menjadi sungai dan tanah lapang menjadi danau⁴. Putusnya jalur perhubungan kereta Kediri-Kertosono serta tidak beroperasinya otobis lijn Kediri-Nganjuk merupakan dampak dari bencana banjir di Kediri.

Bencana banjir pasca kemerdekaan terparah terjadi pada tahun 1952, 1955, 1967 dan 1968. Dikatakan sebagai banjir terparah didasari atas tinggi air ketika terjadinya banjir di Kediri yang mencapai 2 m. Banjir di era ini diperparah dengan kondisi turunnya lahar dari lereng Gunung Kelud yang terbawa oleh air hujan. Seperti yang kita ketahui, Gunung Kelud Meletus pada tanggal 31 Agustus 1951. Di awal tahun 1952 terjadi banjir di Kediri tepatnya air di Kali Konto Kandangan Pare yang membawa material letusan Gunung Kelud. Pola yang sama terjadi pada

²Satu bau setara dengan 0,75 ha. Amboro dkk., *ALBUM METRO TEMPO DULU ERA KOLONISASI 1932-1940an* (Penerbit Sejarah UM Metro, 2018)

³*Tjahaja*, 21 November 1942.

⁴*Pewarta Perniagaan*, 20 November 1942

banjir di Kediri tahun 1966 dan 1967. Pada tahun sebelumnya diketahui pada tanggal 26 April 1966 terjadi letusan Gunung Kelud yang menyebabkan terjadinya banjir lahar pada Kali Konto. Dimana Kali Konto termasuk area penyebaran yang dilewati lahar ketika terjadi letusan Gunung Kelud sejak tahun 1919, 1951 dan 1966.

Upaya pemerintah sepanjang era kolonial hingga Orde Baru dalam mengendalikan banjir dinilai kurang efektif. Pasalnya, bencana banjir menunjukkan tingkat eskalasi yang tinggi dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya yakni berkurangnya daya tampung air sungai ditambah dengan kondisi lebatnya curah hujan. Diberitakan dalam koran *Soeloeh Ra'jat*⁵, kali Brantas meluap karena hujan lebat. Hal inilah yang menjadikan pentingnya antisipasi pengendalian banjir secara efektif. Oleh sebab itu upaya mengeliminasi sebelum dan sesudah terjadinya bencana banjir diharapkan dapat berdampak jangka panjang. Upaya pengendalian banjir diharuskan dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, maka kebijakan pemerintah yang berkuasa menjadi faktor utama keberhasilan pengendalian bencana.

Upaya pengendalian banjir di Kediri dilakukan dengan cara membuat tanggul di sekitar wilayah sungai dan saluran irigasi di masa pemerintahan kolonial. Pemerintah Jepang disibukkan dengan rencana proyek pembuatan terowongan pematusan banjir di Tulungagung. Dengan kata lain, Pemerintah Jepang belum menganggap urgensi dari proyek pengendalian banjir di Kediri karena daerah Tulungagung lebih dulu menjadi perhatian mereka. Upaya pengendalian banjir di

⁵*Soeloeh Ra'jat*, 28 Februari 1947

era ini hanya sebatas persoalan reboisasi. Diantaranya adalah reboisasi tahun 1942-1943 di wilayah Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, dan Tosari, Trenggalek, dan Tulungagung, upaya transmigrasi ke Lampung di tahun 1943, dan pembangunan saluran tahun 1944 yang mengalirkan air di utara sungai Brantas ke daerah Lodoyo, Kabupaten Blitar. Ketiga upaya tersebut belum memberikan dampak yang nyata. Setelah banjir besar tahun 1942, dimana pada tahun berikutnya masih terjadi banjir di Kabupaten Kediri. Jika dinilai secara objektif, tiga tahun berkuasa di Indonesia termasuk waktu yang singkat untuk menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah Jepang dalam hal penanganan banjir.

Upaya reboisasi dan transmigrasilah yang tetap diteruskan programnya hingga masa Orde Baru. Adapun yang menjadi perbedaan upaya reboisasi pemerintah Jepang dengan pasca kemerdekaan terletak pada keterlibatan pemerintah provinsi Jawa Timur. Menariknya, upaya pengendalian banjir di Kediri jika dibandingkan dengan masa pemerintah Jepang bertambah fokus pada lahar dingin dari Gunung Kelud. Persoalan aliran lahar dingin Gunung Kelud telah menjadi perhatian, mengingat banjir lahar dingin sebenarnya sudah terjadi sejak era kolonial.

Respon dan tanggapan ketika terjadinya banjir di Kediri dikatakan tidak jauh berbeda sepanjang pemerintah Jepang hingga Orde Baru. Berbagai bantuan yang datang dalam rangka penanggulangan banjir tidak hanya berasal dari pemerintah pusat Jakarta, juga pemerintah daerah lain, yaitu Malang⁶. Namun, hal yang menarik disini adalah partisipasi dari penduduk sipil. Sejak era pendudukan

⁶Tjahaja, tanggal 28 Desember 1942.

Jepang hingga Orde Baru, penduduk sipil juga berkontribusi memberi sumbangan uang maupun tenaga gotong royong. Sumbangan uang digunakan untuk membantu korban banjir. Sumbangan tenaga digunakan untuk proyek pembangunan dalam rangka penanggulangan banjir. Misalnya di era Jepang, bantuan dari pegawai di seluruh Kabupaten Kediri yang menyumbangkan 1% gajinya, bantuan yang berasal dari pertunjukan amal ketoprak Darmo Moedo Kediri, bantuan sandiwara Sinar Asia milik Krisoebanoe, dan bantuan dari Kwa Song Khoen pemilik pabrik rokok Double Shiu. Sumbangan tenaga secara gotong royong dan dana oleh penduduk desa Kediri dilakukan pada tahun 1953, 1955, dan 1957. Kolaborasi ini menunjukkan bencana banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Mengingat program pembangunan dan perbaikan dalam rangka penanggulangan banjir terus dilakukan oleh pemerintah. Banjir Kediri yang dikategorikan sebagai banjir rutin tahunan juga memerlukan partisipasi penduduk setempat bahu-membahu dalam rangka menanggulangi banjir.

1.2 Rumusan Masalah

Penderitaan penduduk Kediri berupa banjir di musim hujan telah lama diramalkan oleh Raja Jayabaya. Raja yang sekaligus menjadi pujangga tersebut meramalkan, “Kediri dadi kali”, yang artinya “Kediri akan menjadi sungai”. Ramalan tersebut tetap relevan, karena bencana banjir menggenangi wilayah Kediri sejak era kolonial hingga pasca kemerdekaan. Tercatat banjir terjadi di Kediri sebanyak 13 kali sejak tahun 1942 hingga tahun 1970. Dalam rentang waktu tersebut, banjir hadir di Kediri sebagai bencana tahunan terjadi hampir selama satu

dasawarsa yaitu tahun 1950 hingga tahun 1958. Banjir di Kediri tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal, yakni tingginya intensitas curah hujan. Adanya faktor pendukung yang menyertai berakibat pada terjadinya bencana. Faktor pendukung seperti pendangkalan air sungai akibat material yang terbawa arus dari letusan Gunung Kelud. Selain pendangkalan, material yang terbawa arus dari letusan Gunung Kelud yang memenuhi daya tampung sungai nantinya menjadi banjir lahar. Faktor penyebab berikutnya adalah berkurangnya areal hutan baik di Hulu Sungai Brantas maupun di wilayah Kediri. Hal ini berakibat pada berkurangnya pula daerah resapan air ketika musim penghujan.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya eskalasi banjir di Kediri di tahun 1942-1970?
2. Bagaimana upaya penanggulangan banjir di Kediri yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di tahun 1942-1970?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terjadinya sebuah peristiwa pada umumnya memiliki sebab dan akibat yang ditimbulkan. Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi tiga, yaitu tujuan substantif, metodologis, dan historiografis. Secara substansial, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bencana banjir di Kediri di tahun 1942-1980. Identifikasi dimulai

dari penyebab dan dampak yang ditimbulkannya secara kronologis berdasarkan temporal penelitian. Penyebab tersebut adalah penggundulan hutan di daerah hulu dan pengaruh sedimentasi sebagai akibat letusan Gunung Kelud.

Tujuan penelitian ditinjau secara metodologis berada dalam koridor sejarah lingkungan. Sejarah lingkungan mengkaji perkembangan hubungan timbal balik manusia dengan alam⁷. Hal ini sejalan dengan kerangka konsep penulis mengenai dampak dari interaksi manusia dengan alam, yaitu banjir. Secara historiografis, penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan permasalahan lingkungan yang menghubungkan relasi gejala alam dengan manusia dalam ranah lokal. Ranah lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah spasial dari penelitian, yaitu Kediri.

Penelitian ini dapat menambah bahan kajian bagi para akademisi dalam rangka memahami peristiwa banjir di Kediri periode Jepang hingga pasca kemerdekaan dengan menggunakan sudut pandang keilmuan sejarah. Manfaat lainnya terkait dengan digunakannya penelitian ini sebagai pertimbangan pemerintah setempat dalam merumuskan kebijakan yang berkenaan dengan permasalahan lingkungan. Selain itu penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk referensi literatur dalam kaitannya peristiwa banjir yang terjadi di daerah lainnya.

⁷McNeill, J.M. 2003, "Observations on the Nature and Culture of Environmental History". History and Theory, issue 42, hlm. 5-43, dalam Tsabit Azinar Ahmad, "Pembelajaran Sejarah Berwawasan Lingkungan" *Indonesia Journal of Conservation*, Vol. 2, No.1, Juni 2013, hlm. 75.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan spasial dan temporal. Batasan temporal berkenaan dengan waktu terjadinya peristiwa yang ditentukan untuk digunakan dalam penelitian. Batasan spasial merupakan lokasi terjadinya peristiwa ditinjau dari aspek geografisnya. Ruang lingkup penelitian ditentukan berdasarkan fokus permasalahan penelitian yang akan diteliti.

Skripsi yang berjudul Banjir di Kediri Tahun 1942-1970, mengambil batasan temporal tahun 1942 sebagai batasan awal dan tahun 1970 sebagai batasan akhir. Peneliti mengambil tahun 1942 sebagai batasan awal dikarenakan tingginya eskalasi banjir di Kediri di tahun tersebut mencapai 2,13m. Banjir tahun 1942 diberitakan dalam koran *Harian Umum*⁸ sebagai pembanding banjir besar yang terjadi di Kediri dengan banjir tahun 1950. Batasan akhir penelitian ditetapkan di tahun 1970 dikarenakan adanya upaya penanganan banjir yang serius dari pemerintah pusat. Upaya penanganan banjir berupa proyek rehabilitasi DAS Brantas di Kediri, Blitar dan Malang Selatan oleh Perhutani yang dimulai pada tahun 1967. Proyek tersebut menjadi dasar penulis untuk melihat signifikansi terhadap peristiwa banjir di Kediri.

Terkait batasan spasial, penulis mengambil wilayah Kediri. Kediri yang saya maksud adalah wilayah Kabupaten dan Kota Kediri. Hal ini dilatarbelakangi oleh dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir di Kediri yang menggenangi sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Kediri meliputi jalan-jalan, pemukiman, dan

⁸*Harian Umum*, tanggal 23 Februari 1952. Dalam koran tersebut berisikan informasi dari Djawatan Pengairan mengenai tinggi air Brantas 2,13 meter ketika terjadi banjir di Kediri pada tahun 1942.

area persawahan. Daerah Kabupaten Kediri yang terdampak banjir meliputi Kecamatan Grogol, Gampengrejo, Purwoasri, Papar, Pagu, Plemahan, Plosoklaten, Gurah, Kepung, Kandangan, dan Pare. Ditinjau dari aspek topografi, daerah tersebut dilewati aliran Sungai Brantas dan Sungai Konto. Daerah Kota Kediri yang terdampak banjir berada di sepanjang bantaran Sungai Brantas seperti di Kecamatan Kota dan Mojoroto.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian sejarah banjir termasuk dalam kajian sejarah lingkungan. Pentingnya tinjauan pustaka digunakan sebagai referensi dalam penulisan skripsi dengan penelitian serupa. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui kerangka mengenai penelitian yang akan dikaji. Adapun penulisan yang dijadikan rujukan adalah:

Skripsi milik Dahlia Koni Saputri, yang berjudul *Banjir di Kediri Tahun 1900-1942*⁹, mengulas bagaimana peristiwa banjir di Kediri di tahun 1900-1942 mulai dari penyebab, kronologi, dampak, hingga upaya pemerintah kolonial dalam menanggulangi dan mengendalikan banjir. Adapun hal yang dapat disoroti dari pembahasan skripsi ini adalah penulis hanya menguraikan terjadinya peristiwa banjir di Kediri terhenti di tahun 1940. Pada batasan akhir penelitiannya di tahun

⁹ Dahlia Koni Saputri, “Banjir di Kediri tahun 1900-1942”, *Skripsi* (pada Program Studi Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Airlangga, 2015).

1942, penulis tidak banyak menyinggung terkait dampak dari upaya penanggulangan banjir oleh pemerintah kolonial.

Skripsi selanjutnya adalah milik Latif Kusairi, yang berjudul *Ketika Tulungagung Menjadi Rawa: Banjir dan Penanggulangannya, 1942-1986*¹⁰, berbicara tentang bencana banjir di Tulungagung di tahun 1942-1986 meliputi topografi, penyebab, kronologi, dampak hingga upaya pemerintah Jepang hingga pasca kemerdekaan. Adapun hal yang menarik dalam skripsi ini adalah mengenai aspek sosial masyarakat Tulungagung. Aspek sosial yang ditonjolkan yakni kondisi romusha sebagai pekerja proyek penanggulangan banjir di Tulungagung. Karena pada dasarnya, romusha sebagai pemeran utama dalam proyek penanggulangan banjir tersebut. Mengenai fokus banjir penulis membaginya menjadi 2 periode, yaitu periode Jepang dan pasca kemerdekaan.

Skripsi selanjutnya adalah milik Ridha Taqabalallah, yang berjudul *Banjir Bengawan Solo tahun 1966: Dampak dan Respon Masyarakat Kota Solo*¹¹, membahas mengenai bencana banjir Bengawan Solo yang berdampak di Kota Solo meliputi kondisi morfologi kota Solo sejak era Kasunanan hingga pasca kemerdekaan tepatnya tahun 1966. Pembahasan pada kondisi awal kondisi morfologi kota Solo disertai dengan aspek kosmologi masyarakat Jawa. Selain kondisi morfologi terdapat pembahasan tentang upaya penanggulangan dan

¹⁰ Latif Kusairi, "Ketika Tulungagung Menjadi Rawa: Banjir dan Penanggulangannya, 1942-1986", *Skripsi* (pada Program Studi Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Airlangga, 2009).

¹¹ Ridha Taqabalallah, "Banjir Bengawan Solo tahun 1966: Dampak dan Respon Masyarakat Kota Solo", *Skripsi* (pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).

dampak dari bencana banjir Bengawan Solo. Adapun dampak bencana banjir menyinggung pula pada daerah sekitarnya, yaitu Wonogiri dan Sukoharjo. Hal yang ditonjolkan dalam skripsi ini mengenai respon masyarakat kota Solo erat kaitannya dengan pandangan manusia pada keberadaan sungai, yaitu Bengawan Solo. Respon masyarakat dalam skripsi ini dihubungkan dengan karakteristik penduduk Solo yang majemuk nantinya membentuk solidaritas sosial.

Skripsi selanjutnya adalah milik Piolina, yang berjudul *Banjir di Kota Medan: Suatu Tinjauan Historis 1971-1990-an*¹², mengupas bagaimana pertumbuhan kota Medan di tahun 1970-an berpengaruh pada tingkat fluktuasi banjir di kota Medan. Penulis mengawali pembahasan pada sejarah kampung Medan hingga berdirinya *Gemeente* yang menjadikan wajah baru Medan sebagai kota modern. Penulis menghubungkan pula masalah lingkungan perkotaan yang disebabkan oleh kepadatan penduduk di kota Medan. Kepadatan penduduk dikaitkan dengan proses urbanisasi yang mana mengakibatkan alih fungsi lahan oleh manusia di daerah rentan banjir. Dalam skripsi ini, selain masyarakat menjadi pemeran utama, terdapat peran pemerintah maupun non pemerintah yang melakukan upaya penanggulangan banjir. Adapun hal yang menarik dari skripsi ini berupa definisi amnesia sejarah bencana yang digunakan dalam kerangka penelitian. Definisi tersebut digunakan penulis skripsi untuk menggambarkan

¹²Piolina, “Banjir di Kota Medan: Suatu Tinjauan Historis 1971-1990-an”, *Skripsi* (pada Program Studi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, 2009).

bencana banjir yang terjadi di kota Medan secara periodik tanpa upaya penanggulangan permanen.

Buku dari Sarkawi B. Husain yang berjudul *Banjir di Kota Surabaya Paruh Kedua Abad ke-20*¹³, berbicara tentang bencana banjir di Surabaya dalam kurun waktu abad ke-20. Pembahasan dalam disertasi tersebut meliputi kondisi awal topografi kota Surabaya, eskalasi banjir, siklus banjir dan persoalan sosial pasca banjir. Hal yang mendapat sorotan dalam disertasi ini adalah bagaimana persoalan banjir di Surabaya yang tidak pernah selesai mulai dari penanggulangan hingga pengendalian. Pasalnya, aspek-aspek sosial yang menyertai pasca banjir menimbulkan persoalan baru seiring dengan modernisasi kota. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mencegah terjadinya banjir tidak dapat berjalan maksimal apabila partisipasi masyarakat terbilang rendah. Dalam buku ini disebutkan pula hubungan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dengan permasalahan demografi sosial. Penulis membagi kerusakan lingkungan sebagai faktor penyebab banjir menjadi dua periode, yaitu periode pertama tahun 1951-1976 dan periode kedua tahun 1977-2000.

Buku *Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa* karya Restu Gunawan¹⁴ menjadi rujukan penulis untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya pengendalian banjir oleh pemerintah Jakarta. Restu Gunawan memaparkan penanganan permasalahan banjir Jakarta melalui

¹³ Sarkawi B. Husain, *Banjir di Kota Surabaya Paruh Kedua Abad Ke-20* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020).

¹⁴ Restu Gunawan, *Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010).

pendekatan struktural yang melibatkan masyarakat. Pendekatan struktural yang dimaksud dilihat dari sudut pandang fenomena perkotaan sebagai suatu kesatuan dari aspek sosial, budaya, dan geografis. Hal yang patut disoroti dari buku Restu Gunawan adalah mengenai pembahasan banjir yang disandingkan dengan pertumbuhan kota Jakarta dari segi luas wilayah dan pembangunan yang menyertainya.

Buku *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945* karya Aiko Kurasawa¹⁵ menambah pengetahuan penulis mengenai kebijakan bidang pertanian oleh pemerintah Jepang di Jawa. Pasalnya kebijakan pertanian tersebut berujung pada perluasan areal tanam. Akibatnya pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pembukaan lahan baru dengan cara pembabatan hutan. Hal tersebut didasari oleh niat melipatgandakan hasil bumi di Indonesia karena keikutsertaan pemerintah Jepang dalam Perang Pasifik. Aiko dalam bukunya mengupas bagaimana pemerintah Jepang melakukan transformasi pertanian di Indonesia selama masa pendudukannya. Propaganda, lembaga bentukan bidang pertanian, sekolah atau kursus pertanian dilakukan demi mencapai tujuan melipatgandakan hasil bumi di Indonesia. Kesemua usaha pemerintah Jepang tidak akan berhasil tanpa bantuan dari partisipasi masyarakat dengan melibatkan pejabat setempat hingga di tingkat terendah.

¹⁵Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, (Jakarta: Grasindo, 1993).

1.6 Kerangka Konseptual

Banjir merupakan fenomena alam yang terjadi akibat volume air tidak lagi tertampung dalam media air yang berfungsi sebagaimana mestinya seperti sungai, sehingga menggenangi daerah atau kawasan tertentu. Banjir dapat terjadi ketika terjadi penurunan daya tampung (*threshold value*) di sungai, saluran drainase atau pembuang air yang disebabkan sedimentasi dan adanya kerusakan tanggul dan prasarana pengairan lainnya¹⁶. Peristiwa banjir tidak hanya didasari oleh faktor tunggal berkaitan dengan prasarana pengairan. Oleh sebab itu, terdapat jenis-jenis banjir.

Banjir dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu banjir air, banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir pasang. Banjir air adalah jenis banjir yang disebabkan oleh meluapnya sungai. Banjir kiriman yaitu banjir yang terjadi akibat adanya peningkatan limpasan dari daerah atas (permukaan). Banjir lokal disebabkan adanya hujan lokal. Banjir pasang atau Rob disebabkan genangan yang terjadi akibat pasang permukaan laut. Dalam penelitian ini, banjir di Kediri dikategorikan jenis banjir air karena penyebabnya adalah meluapnya Sungai Brantas.

Kondisi meluapnya Sungai Brantas disebabkan oleh berkurangnya daya tampung debit air pada sungai. Proses tersebut tidak luput dari lebatnya curah hujan dan dampak erosi yang berlebihan pada permukaan tanah DAS. Terbawanya hasil dari erosi atau yang biasa disebut dengan sedimentasi menyebabkan pendangkalan pada air sungai. Dalam hal ini, tata kelola DAS penting untuk diperhatikan mengingat kerusakan yang ditimbulkan bermuara pada terjadinya banjir. Sebagian

¹⁶Sunaryo, Trie M, *op.cit*, hlm. 42.

besar kerusakan lingkungan DAS disebabkan oleh akumulasi dampak meningkatnya angkutan sedimen, sampah kayu/organik, bahan kimia, kenaikan suhu, kerusakan flora dan fauna (ekosistem), dan terjadinya peningkatan erosi¹⁷. Penelitian ini mengulas kerusakan lingkungan khususnya penggundulan hutan berakibat pada terjadinya banjir di Kediri.

Penebangan hutan dan alihfungsi lahan yang terjadi di beberapa DAS di Indonesia terbukti berakibat pada peningkatan frekuensi banjir. Pelestarian vegetasi di sepanjang bantaran DAS termasuk upaya penjagaan ekosistem sungai. Terjaganya tumbuhan di sekitar DAS dapat menambah daya serap air ketika musim penghujan. Seperti yang kita ketahui, daerah hulu pun tidak luput dari perhatian utamanya pelestarian hutan. Terganggunya daya serap air di hulu juga mempercepat turunnya air dari lereng pegunungan menuju sungai. Perbaikan DAS Kali Brantas berupa reboisasi menjadi salah satu upaya pengendalian banjir di Kediri.

Disamping banjir air, banjir di Kediri dikategorikan sebagai banjir lahar(debris). Banjir lahar memiliki karakteristik didalamnya terdapat material piroklastik aliran lahar dingin dengan kecepatan pergerakannya yang dipicu oleh gravitasi. Aliran lahar yang semula mengisi lembah-lembah sungai bergerak keluar dari jalur sungai dan menyebar ke segala arah¹⁸. Material sedimentasi berupa pasir, batu, kerikil yang berasal dari letusan Gunung Kelud ini kemudian mengendap dan berakibat pada pendangkalan Sungai Brantas. Gunung Kelud telah meletus sebanyak 3 kali pasca kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1951, 1966, dan

¹⁷Mulyanto, HR. *Efek Konservasi dari Sistem SABO untuk Pengendalian Sedimentasi Waduk*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 13.

¹⁸Widiyanto, dkk. *Banjir Lahar: Pembentukan, Proses, Dampak dan Mitigasinya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 158.

1990. Setiap letusan memuntahkan lahar hingga mencapai jutaan meter kubik. Meskipun secara alamiah, abu letusan gunung api bermanfaat mengembalikan kesuburan tanah pada daerah yang terdampak. Sampah kayu pepohonan dari lereng pegunungan yang ikut roboh pasca letusan terbawa arus ketika intensitas curah hujan meninggi menuju sungai. Material angkutan sedimen tersebut memenuhi dan menyumbat sungai sehingga banjir di Kediri tidak dapat terhindarkan. Dengan demikian, pengendalian material letusan di lereng Gunung Kelud menjadi upaya berikutnya terkait pengendalian banjir di Kediri.

Pengendalian dan penanggulangan banjir merupakan bagian dari penelitian ini. Kegiatan pengendalian banjir adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum banjir terjadi. Sementara kegiatan penanggulangan banjir adalah kegiatan yang dilaksanakan selama banjir berlangsung dan pasca terjadinya banjir. Dalam penelitian ini mengulas bagaimana upaya pemerintah Jepang hingga Orde Baru mengendalikan dan menanggulangi banjir di Kediri.

1.7 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian sejarah sudah seyogyanya pula menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah diartikan sebagai sebuah prosedur guna memahami peristiwa sejarah secara utuh. Selain itu penggunaan ilmu bantu diperlukan dalam menganalisa penelitian tersebut. Metode penelitian sejarah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya adalah pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Pemilihan topik mengenai Banjir di Kediri dipilih karena ketertarikan penulis terhadap peristiwa sejarah lingkungan di tingkat lokal yaitu di Kediri di samping meneruskan temporal kajian banjir di Kediri sebelumnya. Meskipun di lokasi penelitian yang sama, penulis menemukan perbedaan dari penyebab peristiwa banjir dan upaya penanggulangan dan pengendalian banjir dari peneliti sebelumnya.

Heuristik atau pengumpulan sumber dimaksudkan untuk mencari data yang dapat dijadikan sumber penulisan penelitian. Pengumpulan sumber dapat dilakukan dengan cara mengkategorikan dua jenis sumber dalam penulisan sejarah, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer tertulis yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari arsip dan surat kabar. Pencarian arsip dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta Selatan, Balai Bendungan Jakarta Selatan, Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan BAPEDDA Jawa Timur, Monumen Pers Solo, dan Perpustakaan Medayu Agung. Sumber sekunder berupa buku diperoleh di Perpustakaan Grhatama Pustaka Yogyakarta, Perpustakaan Kolsani Yogyakarta, Jogja Library Center, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unair, Perpustakaan Universitas Airlangga, dan Perpustakaan Medayu Agung serta website resmi yang menyediakan berbagai kumpulan surat kabar terkait peristiwa banjir di Kediri. Adapun website yang dimaksud disini adalah Delpher, KITLV, dan Tropenmuseum.

Tahapan selanjutnya adalah kritik sumber. Kritik sumber bertujuan untuk menghasilkan temuan penelitian yang obyektif dan ilmiah. Kritik sumber ialah

verifikasi atas sumber-sumber yang telah diperoleh melalui kritik interen dan ekstern. Kritik interen dilakukan dengan cara menelaah kembali isi dari hasil penelitian yang telah disusun sementara berdasarkan data yang diperoleh dan kritik eksteren berkenaan dengan pengujian validitas sumber-sumber yang telah didapat.

Setelah melewati proses kritik sumber tahapan selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran. Hasil interpretasi merupakan kunci dari hasil temuan penelitian. Interpretasi atau analisis bertujuan untuk melihat hubungan sebab-akibat berdasarkan sumber data dan fakta yang telah diperoleh, sehingga hasil interpretasi bergantung pada kemampuan dari analisa penulis.

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi. Tahapan historiografi adalah tahap akhir dari tahapan-tahapan sebelumnya berupa penulisan sejarah. Penulisan sejarah didasari atas fakta yang ditemukan pada sumber penulisan yang sudah diverifikasi sebelumnya. Untuk penulisannya tidak lepas dari kaidah metode penulisan sejarah itu sendiri yaitu secara kronologis.

1.8 Sistematika Penelitian

Skripsi yang berjudul Banjir di Kediri Tahun 1942-1970, memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri atas delapan sub bab. Dimulai dari uraian latar belakang masalah mengenai topik yang dikaji oleh penulis. Latar belakang tersebut merupakan pengantar dari pembahasan. Sebab, berangkat dari latar belakang menghasilkan rumusan masalah. Kemudian, dilanjutkan pemaparan

tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi mengenai kondisi geografis, iklim dan kondisi penduduk Kota dan Kabupaten Kediri di tahun 1942-1970. Pada bab ini dijelaskan bagaimana pengaruh kondisi geografis beserta iklim terhadap terjadinya peristiwa banjir di Kediri. Terkait dengan kondisi penduduk di Kediri di tahun 1942-1970, penulis akan menekankan pada kebijakan pemerintah pada masa itu yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Kota Kediri.

Bab ketiga berbicara tentang kronologis, dampak, dan upaya terjadinya banjir di Kediri. Pembahasan diawali dengan uraian penyebab dari terjadinya banjir di Kediri. Ditambahkan pula pemaparan peristiwa banjir di periode sebelumnya. Data yang diperoleh penulis pada saat ini mengungkapkan penyebab terjadinya banjir di Kediri dikarenakan oleh intensitas curah hujan yang tinggi serta pembukaan lahan sepanjang era pendudukan Jepang hingga pasca kemerdekaan. Peristiwa banjir terparah yang ditemukan penulis yaitu pada bulan November 1942. Untuk kronologisnya akan dijelaskan berdasarkan sumber yang ditemukan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari banjir di Kediri adalah kerugian materil berupa putusnya akses transportasi kereta dan otobis lijn, terendamnya sawah dan rumah warga, dan keterbatasan akses jalan yang mengganggu aktivitas warga yang kemudian mengharuskan untuk mengungsi. Upaya yang penanggulangan dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil.

Bab keempat berisikan proyek penanggulangan banjir sejak pemerintah kolonial Belanda hingga pemerintah Orde Baru. Proyek penanggulangan banjir

yang dikerjakan meliputi beberapa sektor. Dalam bab keempat tersebut dapat dilihat dari perencanaan proyek, realisasi proyek, dan signifikansi dari keberadaan proyek tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dan temuan dari penulis. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.